



BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

e-klipping

Kumpulan Berita Harian Media Online

SUBJEK

SARANA DAN PRASARANA

Jumat, 1 September 2023

BIRO HUMAS, KEARSIPAN DAN TATA USAHA PIMPINAN
Perpustakaan
2023

Daftar Isi

1. REINDUSTRIALISASI DAN AGROMARITIM 5.0 – *Media Online Kompas*
2. KETERKAITAN ESG, CSR DAN SDGs: MENGAPA KITA HARUS MEMAHAMINYA
(2) – *Media Online Media Indonesia*

KOMPAS

JUMAT

AMANAT HATI NURANI RAKYAT

1 September 2023

Reindustrialisasi dan Agromaritim 5.0

Arif Satria
Rektor IPB University



Pada 1 September 2023, IPB University berusia 60 tahun. Yang terus dinantikan publik adalah sumbu apa yang telah dan akan diberikan untuk kemajuan bangsa. Lebih-lebih mengonson Indonesia Emas 2045.

Pada tahun 2045 diprediksi Indonesia akan menjadi empat besar negara ekonomi terbesar di dunia. Persiapan-persiapan menuju 2045 harus dilakukan dari sekarang, baik dari sisi desain ekonomi maupun pengembangan kualitas sosial manusia.

Dalam konteks ekonomi, untuk mewujudkan ketangguhan ekonomi 2045, kita perlu perotet hari ini. Ternyata, fenomena de-industrialisasi di Indonesia telah terjadi. Hal ini terlihat dari penurunan pangsa sektor industri terhadap produk domestik bruto dari 21,57 persen (2010) menjadi 17,94 persen (2023).

Padahal, satu hal yang penting untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 tersebut adalah industri yang tepat. Karena itu, desain reindustrialisasi yang tepat harus kita desain dengan cermat. Hal ini juga penting untuk mengabaikan Indonesia dari jebakan negara berpenghasilan menengah.

Industri, industrialisasi, dan reindustrialisasi
Ada dua paradigma yang kini mengemuka, yaitu paradigma "industri di Indonesia" dan "industrialisasi Indonesia". Paradigma "industri di Indonesia" lebih bermula sebagai pertumbuhan industri yang bertempat di Indonesia. Tidak jadi

soal apakah industri tersebut cocok atau tidak dengan kultur masyarakat Indonesia. Tidak jadi soal pula apakah industri tersebut melibatkan masyarakat atau tidak. Yang penting hanyalah hauran ekonomi yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Masyarakat lokal tidak mampu terlibat dalam industrialisasi dan berpotensi menjadi penonton pertumbuhan. Paradigma ini akan membuat adanya transformasi ekonomi tanpa transformasi sosial.

Ketidakterlibatan masyarakat dalam proses pertumbuhan industri dengan peroyatan industri, seperti kompetensi, keterampilan, dan aspek sosial-budaya lainnya. Akibatnya, yang terjadi adalah masyarakat akan tertinggal di kampungsnya sendiri karena tidak ada kaitan antara kehadiran industri dan karakteristik sosial masyarakat.

Paradigma industrialisasi Indonesia di atas mestinya bisa memuat reindustrialisasi Indonesia ke depan. Salah satunya reindustrialisasi dilakukan dengan memperhatikan struktur sosial yang ada. Hal ini penting agar reindustrialisasi ini mampu melibatkan mayoritas masyarakat kita sehingga terjadi kaitan ke belakang yang kuat. Masyarakat akan menikmati fase pembangunan dan perbaikan rumah yang masih harus kita tuntaskan. Berdasarkan World Inequality Report (2022), 10 persen penduduk teratas di Indonesia memperoleh pendapatan sebesar 48 persen dalam setahun, sementara 50 persen terbawah di Indonesia memperoleh pendapatan yang setara dengan hanya 12,4 persen dari total pendapatan dalam setahun.

Fenomena ini menunjukkan terjadi peningkatan pertambahan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi per kapita, tetapi ketimpangan pendapatan di Indonesia juga meningkat. Indeks gini pada tahun 1996 sebesar 0,32 dan meningkat menjadi 0,37 tahun 2020. Peningkatan koefisien gini menunjukkan peningkatan ketimpangan pendapatan Indonesia.

Sementara itu, "industrialisasi Indonesia" lebih menekankan proses transformasi sosial, yang melibatkan proses perubahan perilaku dan budaya masyarakat.

Dengan demikian, industrialisasi Indonesia sebenarnya bermakna mengindustrialkan masyarakat Indonesia agar masyarakat memiliki kultur dan perilaku yang sejalan dengan nilai-nilai industrial, baik dalam dunia kerja maupun kehidupan sehari-hari. Di sinilah transformasi ekonomi berjalan beriringan dengan transformasi sosial.

Paradigma industrialisasi Indonesia di atas mestinya bisa memuat reindustrialisasi Indonesia ke depan. Salah satunya reindustrialisasi dilakukan dengan memperhatikan struktur sosial yang ada. Hal ini penting agar reindustrialisasi ini mampu melibatkan mayoritas masyarakat kita sehingga terjadi kaitan ke belakang yang kuat. Masyarakat akan menikmati fase pembangunan dan perbaikan rumah yang masih harus kita tuntaskan. Berdasarkan World Inequality Report (2022), 10 persen penduduk teratas di Indonesia memperoleh pendapatan sebesar 48 persen dalam setahun, sementara 50 persen terbawah di Indonesia memperoleh pendapatan yang setara dengan hanya 12,4 persen dari total pendapatan dalam setahun.

Fenomena ini menunjukkan terjadi peningkatan pertambahan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi per kapita, tetapi ketimpangan pendapatan di Indonesia juga meningkat. Indeks gini pada tahun 1996 sebesar 0,32 dan meningkat menjadi 0,37 tahun 2020. Peningkatan koefisien gini menunjukkan peningkatan ketimpangan pendapatan Indonesia.

Sementara itu, "industrialisasi Indonesia" lebih menekankan proses transformasi sosial, yang melibatkan proses perubahan perilaku dan budaya masyarakat.

Dengan demikian, industrialisasi Indonesia sebenarnya bermakna mengindustrialkan masyarakat Indonesia agar masyarakat memiliki kultur dan perilaku yang sejalan dengan nilai-nilai industrial, baik dalam dunia kerja maupun kehidupan sehari-hari. Di sinilah transformasi ekonomi berjalan beriringan dengan transformasi sosial.

Paradigma industrialisasi Indonesia di atas mestinya bisa memuat reindustrialisasi Indonesia ke depan. Salah satunya reindustrialisasi dilakukan dengan memperhatikan struktur sosial yang ada. Hal ini penting agar reindustrialisasi ini mampu melibatkan mayoritas masyarakat kita sehingga terjadi kaitan ke belakang yang kuat. Masyarakat akan menikmati fase pembangunan dan perbaikan rumah yang masih harus kita tuntaskan. Berdasarkan World Inequality Report (2022), 10 persen penduduk teratas di Indonesia memperoleh pendapatan sebesar 48 persen dalam setahun, sementara 50 persen terbawah di Indonesia memperoleh pendapatan yang setara dengan hanya 12,4 persen dari total pendapatan dalam setahun.

Fenomena ini menunjukkan terjadi peningkatan pertambahan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi per kapita, tetapi ketimpangan pendapatan di Indonesia juga meningkat. Indeks gini pada tahun 1996 sebesar 0,32 dan meningkat menjadi 0,37 tahun 2020. Peningkatan koefisien gini menunjukkan peningkatan ketimpangan pendapatan Indonesia.

Sementara itu, "industrialisasi Indonesia" lebih menekankan proses transformasi sosial, yang melibatkan proses perubahan perilaku dan budaya masyarakat.

Dengan demikian, industrialisasi Indonesia sebenarnya bermakna mengindustrialkan masyarakat Indonesia agar masyarakat memiliki kultur dan perilaku yang sejalan dengan nilai-nilai industrial, baik dalam dunia kerja maupun kehidupan sehari-hari. Di sinilah transformasi ekonomi berjalan beriringan dengan transformasi sosial.

Paradigma industrialisasi Indonesia di atas mestinya bisa memuat reindustrialisasi Indonesia ke depan. Salah satunya reindustrialisasi dilakukan dengan memperhatikan struktur sosial yang ada. Hal ini penting agar reindustrialisasi ini mampu melibatkan mayoritas masyarakat kita sehingga terjadi kaitan ke belakang yang kuat. Masyarakat akan menikmati fase pembangunan dan perbaikan rumah yang masih harus kita tuntaskan. Berdasarkan World Inequality Report (2022), 10 persen penduduk teratas di Indonesia memperoleh pendapatan sebesar 48 persen dalam setahun, sementara 50 persen terbawah di Indonesia memperoleh pendapatan yang setara dengan hanya 12,4 persen dari total pendapatan dalam setahun.

Fenomena ini menunjukkan terjadi peningkatan pertambahan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi per kapita, tetapi ketimpangan pendapatan di Indonesia juga meningkat. Indeks gini pada tahun 1996 sebesar 0,32 dan meningkat menjadi 0,37 tahun 2020. Peningkatan koefisien gini menunjukkan peningkatan ketimpangan pendapatan Indonesia.

agromaritim dapat menjadi locomotif ekonomi Indonesia karena memiliki tarikan yang kuat ke belakang (produksi primer) dan ke depan (distribusi, logistik, perdagangan).

Minimal ada dua tumpuan penting untuk reindustrialisasi agromaritim yang bisa disambungkan pergaruan tinggi (PT) secara langsung. Pertama, inovasi unggul. Kedua, inovasi agromaritim harus berorientasi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan peningkatan daya saing melalui inovasi teknologi 4.0 berbasis teknologi maju, seperti kecerdasan buatan, drone, blockchain, robotik.

Revolusi biologi yang mengintegrasikan teknologi informasi dan ilmu biologi menjadi kunci agromaritim ke depan, seperti hadirnya bioinformatika dan bioelektronik. Elektronik juga bisa digunakan untuk memecahkan kebutuhan sistem logistik agromaritim. Kombinasi kedua orientasi ini membuat ciri baru menjadi inovasi agromaritim 5.0 dengan unsur manusia, sosial, dan lingkungan berkeadilan dengan teknologi 4.0 (Khalder dan Kertajaya, 2022).

Tumpuan inovasi agromaritim 5.0 adalah kualitas riset. Sekitar 68 persen riset IPB bertema agromaritim 4.0 yang menjadi modal untuk inovasi.

Dalam konteks kekinifitas global, Baldrin (2022) dengan *smile curve* menggambarkan pentingnya penelitian dan pengembangan dalam tahapan rantai nilai global (*global value chain*). Penelitian dan pengembangan dalam rantai produksi memiliki nilai tambah tinggi. Oleh karena itu, ekosistem riset agromaritim harus diperkuat dengan peta jalan yang terukur, infrastruktur dan sumber daya riset yang memadai, serta kualitas peneliti yang penunjang inovasi baru.

Kedua, modal manusia perlu diarahkan untuk menjadi *techpreneur*, *socialpreneur*, dan tenaga profesional yang bisa mengatasi masalah regenerasi petani di tingkat hulu. *Techpreneur* adalah pelaku industri agromaritim berbasis inovasi PT. Kini, sekitar 40 persen mahasiswa baru IPB ingin jadi pengusaha sehingga harus di desain program yang sistematis seperti *CEO school*, yang *agropreneur camp*. IPB juga telah membangun *start up center*.

Sementara, *socialpreneur* adalah pelaku pemberdayaan masyarakat agromaritim berbasis inovasi. Dalam lima tahun terakhir (2018-2023), IPB telah menyetujui 4.235 desa atau 5,7 persen desa di Indonesia melalui aneka program, seperti Desa Prestasi, One Village One CEO, Sekolah Peternakan Rakyat, DigTani, Sekolah Pemerintahan Desa, dan Agribusiness Technology Park.

Berdasarkan Time Higher Education (THE) Impact Ranking 2023, IPB masuk peringkat sepuluh besar dunia untuk SDGs 1 (*no poverty*) dan SDGs 2 (*zero hunger*), dan peringkat 1 dunia SDGs 8 (*decent work and economic growth*).

Tenaga profesional adalah pekerja yang memiliki keahlian yang diperlukan industri. Untuk menghasilkan ketiga sosok lauran PT tersebut diperlukan ekosistem pendidikan yang kondusif sehingga transformasi kurikulum secara dinamis menjadi kesiapan agar lulusan kompatibel dengan prasyarat perubahan yang begitu cepat.

Tentu, masih banyak lagi agenda untuk transformasi ekonomi berbasis industri agromaritim yang tidak bisa diselesaikan oleh PT. Yang diperlukan adalah sinergi semua pihak, baik untuk infrastruktur, sistem logistik, investasi, maupun perdagangan yang berpihak.

Namun, semua itu perlu peta jalan industrialisasi agromaritim yang sistematis dan perlu dukungan politik kuat. Hal ini bisa dimulai dengan penyusunan Rencana Jangka Panjang Nasional 2025-2045 yang menegakan industri agromaritim sebagai locomotif pembangunan ekonomi nasional.

Hlm: 7 - Kolom: Opini



Jumat, 1 September 2023

Keterkaitan ESG, CSR, dan SDGs: Mengapa Kita Harus Memahaminya (2)



Maria R Nindita Radyati, PhD
Ketua ESG Taskforce Kadin dan Pendiri ISA (Institute for Sustainability and Agility)

Tata Kelola, Strategi, Manajemen Risiko, Metric, dan Target yang akan dicapai dalam bidang ESG.

Tata Kelola ESG ialah pengungkapan atas proses tata kelola, kontrol, dan prosedur yang digunakan perusahaan untuk memantau dan mengelola risiko dan peluang terkait keberlanjutan.

Strategi ESG ialah pengungkapan tentang pendekatan yang digunakan perusahaan untuk mengelola risiko dan peluang terkait keberlanjutan.

Manajemen risiko ESG menuntut pengungkapan atas proses yang digunakan perusahaan untuk mengidentifikasi, menilai, memprioritaskan, dan memantau risiko dan peluang terkait keberlanjutan.

DA panduan lain yang baru diperkenalkan pada Juni 2023, yakni IFRS S1 dan S2. IFRS ialah *sustainability disclosure standard*.

IFRS S1 ialah *general requirements for disclosure of sustainability-related financial information* dan S2 ialah *climate-related disclosures*. Standar ini merupakan penggabungan antara berbagai panduan agar mudah dipergunakan untuk perbandingan. Standar IFRS S1 dan S2 mewajibkan perusahaan mengungkapkan

Metric dan Target mengungkapkan kinerja perusahaan dalam mengelola risiko dan peluang terkait keberlanjutan, termasuk kemajuan menuju target apa pun yang telah ditetapkan perusahaan ataupun yang diwajibkan oleh hukum atau peraturan.

Pengungkapan ESG merupakan pelaporan publik khusus tentang kinerja organisasi seputar lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Untuk memastikan konsistensi dan keterbandingan, pengungkapan ESG penting disajikan dengan menggunakan

7 Bidang Utama TJSL menurut ISO 26000

- 1. Lingkungan hidup
- 2. HAM
- 3. Praktik tenaga kerja
- 4. Isu konsumen
- 5. Pelibatan dan pengembangan komunitas
- 6. Praktik operasi yang adil
- 7. Tata kelola organisasi

Kerangka ESG



Pengungkapan



Keterkaitan antara ESG, CSR dan SDGs

Jika standar ESG memberikan panduan metrik/indikator, yang mayoritas data kuantitatif, ISO 26000 memberikan panduan yang notabene kualitatif, yakni rekomendasi aktivitas.

Contoh rekomendasi di bidang *Environment* topik Efisiensi Energi ialah 'Organisasi harus menerapkan program efisiensi energi untuk mengurangi permintaan energi untuk bangunan, transportasi, proses produksi, peralatan dan peralatan elektronik'.

Adapun di bidang *Social*, topik Kesehatan dan Keselamatan Kerja, rekomendasinya ialah 'Organisasi harus mengembangkan, menerapkan dan memelihara kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja berdasarkan prinsip standar keselamatan dan kesehatan kerja yang kuat'.

Untuk bidang *Tata-Kelola* topik Antikorupsi ialah 'Organisasi harus memastikan kepemimpinannya memberikan teladan antikorupsi dan memberikan komitmen, dorongan dan pengawasan terhadap implementasi kebijakan antikorupsi'. (5-1)

pedoman dan format yang merupakan panduan ataupun standar yang diakui global, seperti yang telah disebutkan di atas, dengan tujuan untuk menghindari *greenwashing*. Pengungkapan ESG dikonsumsi oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk komunitas investasi, pelanggan, karyawan, regulator, dan mitra rantai pasokan. Pengungkapan ESG membantu pemangku kepentingan, seperti investor, kre-

ditur, karyawan, calon pelanggan, dan lain-lain dalam memahami bagaimana perusahaan mengelola risiko dan peluang ESG.

Adapun contoh risiko ESG ialah 1) Risiko lingkungan. Ini dapat mencakup kerentanan perubahan iklim, risiko kelangkaan air, atau paparan peraturan emisi karbon. 2) Risiko sosial, dapat mencakup masalah keselamatan pekerja, kurangnya upah yang adil, atau perlakuan buruk terhadap

pekerja. 3) Risiko tata kelola, dapat mencakup kurangnya transparansi dalam praktik akuntansi atau keuangan, kurangnya keragaman atau perwakilan dewan, atau kompensasi eksekutif yang berlebihan.

Pengungkapan ESG mencerminkan bagaimana perusahaan berupaya memitigasi risiko-risiko tersebut dan menguraikan langkah-langkah konkret untuk menerapkan strategi ESG.